

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BULOTA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Tiara Bula<sup>1</sup>, Zuchri Abdussamad<sup>2</sup>, Rusli Isa<sup>3</sup>  
[tiyarabulla44@gmail.com](mailto:tiyarabulla44@gmail.com)<sup>1</sup>, [zuchriabdussamad@ung.ac.id](mailto:zuchriabdussamad@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [rusli\\_isa@ung.ac.id](mailto:rusli_isa@ung.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Negeri Gorontalo

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo telah dijalankan sesuai dengan peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Evaluasi kebijakan dilakukan terhadap pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Bulota dimana evaluasi tersebut menyangkut isi kebijakan, yakni Program keluarga harapan (PKH) dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berhasil mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Evaluasi pelaksanaan kebijakan Program keluarga harapan (PKH) lebih ditekankan kepada pembuat kebijakan untuk dapat memperhatikan pada saat pemukhtahiran data dan pencairan penyaluran bantuan hal ini langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat menyebabkan masalah serta hambatan dalam proses pelaksanaan program.

**Kata kunci :** Evaluasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH).

### ABSTRACT

*This study aims to find out the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Bulota Subdistrict, Limboto District, Gorontalo Regency, viewed in terms of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and determination. This research method employed a descriptive approach with qualitative data analysis. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Based on the field research results, the evaluation of the Family Hope Program (PKH) Policy in Bulota Subdistrict, Limboto District, Gorontalo Regency, has been implemented in accordance with government regulations and established provisions. Considering the aspects of effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and determination, policy evaluation is conducted on the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bulota Subdistrict, where the evaluation concerns the policy content, namely that the Family Hope Program (PKH) is appropriately implemented align with applicable regulations and has successfully reduced poverty rates and improved the quality of human resources, as well as changed the behavior of Beneficiary Families (KPM). Evaluation of the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy is emphasized more on policymakers to pay attention during data updates and disbursement of aid, as this is directly determined by the Central Government, which can cause problems and obstacles in the program implementation process.*

**Keyword:** Policy Evaluation, Family Hope Program (PKH).

### PENDAHULUAN

Kemiskinan seringkali menjadi permasalahan yang meresahkan negara-negara besar, oleh karena itu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan. Di negara-negara maju banyak terdapat lapangan kerja yang terbuka sehingga angka pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan berkurang, selain itu pemerintah mempunyai peran untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja

sesuai dengan jumlah penduduk saat ini. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam tiga kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap usaha penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menentukan bahwa: “Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dan guncangan dan kerentanan sosial”

Kedudukan Program Keluarga Harapan adalah salah satu bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik pusat maupun daerah. Pada implementasi kebijakan ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial serta melibatkan beberapa kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Bank Rakyat Indonesia. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang berisi pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, selain itu juga Provinsi Gorontalo merupakan satu dari tujuh provinsi awal yang menjadi lokasi pelaksanaan PKH pada tahun 2007. Sedangkan di Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Limboto, Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan pada tahun 2012 yang dijalankan di setiap Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Limboto yang dilakukan secara bertahap di setiap tahunnya, tak terkecuali di kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Kelurahan Bulota merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang mendapatkan program pemerintah yaitu program keluarga harapan (PKH), yang disalurkan kepada masyarakat yang termasuk sebagai penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta penerima PKH.

Adapun jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 1 Penerima PKH Di Kelurahan Bulota Tahun 2021-2023

<b>Nama Desa</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Bulota	2021	177
	2022	138
	2023	156

*Sumber: Koordinator Sekretariat PKH Kabupaten Gorontalo 2023*

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2021 berjumlah 177 orang, dan di tahun 2022 berkurang menjadi 138 orang, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 156 orang penerima.

Berdasarkan observasi awal terdapat permasalahan-permasalahan antara lain yaitu yang pertama penerima bantuan PKH di Kelurahan Bulota yang melakukan graduasi mandiri untuk disetiap tahun itu belum tentu ada, sehingga mengakibatkan masih adanya orang terdaftar dalam rumah tangga miskin tidak mendapatkan bantuan PKH tersebut. Hal ini berimbang, dimana setiap tahunnya selalu ada penambahan masyarakat yang menjadi keluarga penerima bantuan. Kedua, masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program yaitu tidak ada lagi verifikasi komitmen di fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga membuat keluarga penerima bantuan (KPM) tidak komitmen lagi terhadap pelaksanaan program. Ketiga, sosialisasi menyeluruh tentang program PKH terdapat hambatan dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan mengerti mengenai bantuan program PKH tersebut, dan masalah yang hadir yaitu penerima langsung ditetapkan oleh pusat sehingga kadang pendamping bingung ketika ada yang ditetapkan menjadi penerima tapi sudah lama meninggal, dan untuk penyaluran sudah langsung dari pusat dan jadwal penyaluran tidak diketahui dengan pasti oleh pendamping dan kadang penerima yang menginformasikan bahwa bantuan sudah masuk ke rekening mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dengan model triangulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian yaitu metode kualitatif, sehingga lebih spesifik pada lokus dan fokus yang tidak bias digeneralisir.

Tahapan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan, dan tahapan analisis data. Kegiatan dan pertimbangan penelitian dapat dilihat dari penyusunan rancangan penelitian dan memilih lapangan penelitian. Tahapan pelaksanaan lapangan terdiri dari 1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, 2) memasuki lapangan dan 3) berperan serta sambil mengumpulkan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan dari penelitian bahwa untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto sebagaimana dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 yang berisi pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, selain itu juga Provinsi Gorontalo merupakan satu dari tujuh provinsi awal yang menjadikan lokasi pelaksanaan PKH pada tahun 2007. Dengan melihat beberapa aspek yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) mengenai evaluasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan yaitu pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan analisis lebih dalam tentang kebijakan yang sedang dijalankan. Informan kunci dan pendukung diwawancarai untuk analisis. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Efektivitas**

Berdasarkan hasil penelitian terkait aspek efektivitas dalam evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto

Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa dalam efektivitas yaitu melihat upaya Pemerintah Daerah dalam mengsucceskan program keluarga harapan berhasil sesuai dengan apa yang menjadi target atau tujuan dari program keluarga harapan, sehingga dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Limboto dianggap berhasil, program tersebut dijalankan sejak tahun 2012, dan dengan adanya keluarga penerima yang sudah mampu menghidupi keluarganya secara mandiri maka dianggap sudah tidak layak jadi penerima, dan itu akan diketahui oleh pihak pelaksana pada proses pemutakhiran data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Deden Suhendra (2022) bahwa efektivitas Kebijakan PKH di Kabupaten Cianjur, program ini telah berhasil dalam mencapai tujuannya khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

#### b. Efisiensi

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terkait dengan efisiensi yang digunakan dalam evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Bulota menunjukkan bahwa, pelaksana kebijakan yaitu koordinator dan pendamping PKH sudah diikuti dengan pelatihan-pelatihan dan dasar-dasar dalam proses pelaksanaan PKH oleh karenanya sebelum mereka melaksanakan tanggung jawab dilapangan koordinator maupun pendamping sudah dibekali sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan. Koordinator dan pendamping sudah bekerja secara optimal karena mereka wajib harus berkomunikasi dengan baik. Selain itu pendamping PKH juga merasakan hambatan-hambatan dalam pelaksana program tersebut seperti KPM yang tidak ikut hadir dalam kegiatan posyandu dan juga masih ada KPM yang sulit memaksa anak untuk pergi sekolah.

Jadi dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan (PKH) para pelaksana kebijakan sudah menjalankan program sesuai dengan pedoman yang telah diberikan, akan tetapi masih ada hambatan yang muncul dilapangan hal ini sesuai dengan pernyataan dari pelaksana. Selain itu dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan, pendampingan PKH yang berada di Kelurahan Bulota dalam menjalankan perannya sesuai dengan keentuan, dalam memberikan fasilitas bagi peserta PKH pendampingan selalu turut serta dalam proses tersebut. Untuk itu tugas maupun tanggung jawab pendamping selalu dilaksanakan dalam mendampingi peserta setiap bulannya untuk melakukan kewajiban dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan komponen, baik itu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Hasil dari penelitian diatas sejalan dengan temuan penelitian dari Sandri Gustyansyah (2020) bahwa SDM dalam pelaksana program dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan, maka dapat dianalisa bahwa SDM PKH tersebut sudah direkrut dengan baik yang dibekali dengan pelatihan -pelatihan untuk turun langsung berhadapan dengan masyarakat penerima bantuan.

#### c. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selaku penerima bantuan program keluarga harapan bahwa jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan kategori masing-masing dengan menerima dalam waktu selama tiga bulan dalam satu tahap. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi perubahan pada saat menerima bantuan, dari tahun-tahun sebelumnya mereka menerima dengan waktu tiga bulan dan pada tahun 2023 KPM menerima bantuan dalam waktu dua bulan sudah cair atau sudah bisa menerima. Hal ini ini sesuai dengan pernyataan dari para informan diatas, tetapi perubahan ini belum diketahui pasti oleh KPM. Selanjutnya untuk besaran bantuan PKH yang diterima oleh KPM menurut koordinator dan pendamping sudah mencukupi kebutuhan dari masyarakat penerima bantuan karena sudah meringankan pengeluaran ekonomi keluarga. Dari

pernyataan para informan diatas berpendapat bantuan yang mereka peroleh sudah cukup karena sudah membantu mereka untuk kebutuhan anak. Selain itu keluarga penerima manfaat (KPM) sudah merasakan manfaat dari bantuan PKH sebab mereka yang sebelumnya ekonomi terbatas atau kurang, sekarang sudah mampu untuk membiayai pendidikan anak karena sudah dibantu oleh Pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH). Berikut jumlah nominal bantuan PKH berdasarkan kategori masing-masing penerima:

Tabel 2 Jumlah nominal  
Ketegori

NO	Kategori	Jumlah
1	Ibu Hamil	Rp. 750.000
2	Anak usia dini/Balita	Rp. 750.000
3	Lansia	Rp. 600.000
4	Anak sekolah SD	Rp. 225.000
5	Anak sekolah SMP	Rp. 375.000
6	Anak sekolah SMA	Rp. 500.000

PKH sesuai dengan

(Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH 2023)

Dari tabel diatas maka bantuan yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat semua sudah ditentukan sesuai dengan kategori masing-masing penerima. Hal ini menjadi patokan agar penerima tahu nominal bantuan yang diperoleh apakah sudah sesuai atau tidak. Bantuan PKH ini disebut bantuan non tunai jadi KPM yang menerima bantuan tidak secara langsung diberi bantuan program, akan tetapi diterima melalui transaksi yang dimana KPM sudah memiliki kartu ATM yang dikenal dengan kartu keluarga sejahtera.

#### d. Pemerataan

Hasil penelitian menunjukan bahwa program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan di Kelurahan Bulota sudah disosialisasikan oleh pendamping PKH secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum ditetapkannya masyarakat yang menjadi penerima bantuan dan untuk sosialisai ini lebih banyak yang ikut adalah penerima keluarga manfaat. Selanjutnya yang dilakukan oleh pendamping dalam memberikan informasi kepada keluarga penerima manfaat terkait dengan PKH yaitu biasanya penyampaian informasi tersebut melalui grup whatsapp, begitu juga dengan ketua-ketua kelompok setiap lingkungan pasti akan terus menginfokan kepada KPM lewat grup yang didalamnya beranggotakan semua KPM Kelurahan Bulota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari para informan diatas baik masyarakat maupun pendamping. Untuk itu pemerataan sangatlah diperlukan agar masyarakat calon penerima sebelum ditetapkan maka harus disosialisasikan secara merata agar mereka bisa mengerti apa saja yang menjadi ketentuan serta syarat untuk menjadi penerima, begitu juga mengenai penyampaian penting mengenai pelaksanaan program perlu disampaikan oleh pendamping kelurahan kepada keluarga penerima agar mereka tidak ketinggalan informasi terkini mengenai program. Selain pendamping ada juga ketua-ketuan kelompok di setiap lingkungan yang sudah dipilih untuk membantu pendamping dalam proses pelaksanaan program tersebut.

#### e. Responsivitas

Hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di kelurahan bulota yang disampaikan dari beberapa informan diatas menunjukan bahwa

keluarga penerima manfaat menyatakan mereka merasa sangat bersyukur menerima bantuan sebab sudah membantu KPM dalam membiayai kebutuhan anak untuk sekolah. Kemudian terkait dengan sikap dari pendamping yang menjadi pihak pelaksana program masyarakat KPM memberitahu bahwa pendamping kelurahan menunjukan sikap yang baik kepada KPM PKH serta sering memberikan masukan atau nasehat kepada mereka. Disamping itu dalam pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dianggap sangat bermanfaat bagi KPM karena pertemuan ini mengajarkan mengenai kesehatan gizi bagi anak, pencegahan stunting, dan memberi makan yang steril kepada balita. Pertemuan P2K2 menurut KPM sama sekali tidak mengganggu aktivitas mereka dalam sehari-hari karena mereka diwajibkan hadir dalam pertemuan tersebut, jika ditemui ada KPM yang tidak mengikuti maka akan diberi sanksi oleh pendamping sanksi yang diberikan akan dikeluarkan menjadi penerima apabila tidak mengikuti pertemuan kurang lebih sepuluh kali pertemuan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH yang berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah dari program dan masyarakat masih tetap mengikuti ketentuan yang diberikan seperti ikut serta dalam pertemuan pelaksanaan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Pendamping kelurahan juga bekerja dengan baik dan sering memberi masukan kepada KPM serta menjalin komunikasi dengan baik bersama mereka.

#### f. Ketetapan

hasil penelitian dari beberapa informan bahwa masyarakat penerima bantuan dari awal menerima sudah merasakan manfaat dari bantuan program PKH karena sudah membantu memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan anak-anak KPM untuk sekolah dan semua penerima yang termasuk dalam informan diatas dari keluarga yang miskin atau kurang mampu. Koordinator PKH menganggap bahwa bantuan program menjadi solusi terkait dengan masalah ekonomi masyarakat karena Pemerintah sudah membantu ekonomi keluarga, berbeda dengan hasil pendapat dari pendamping ia mengungkapkan PKH tidak menjadi solusi utama dari permasalahan ekonomi KPM tetapi PKH sudah membantu mengurangi beban keluarga dan hanya menjadi tambahan stimulan. Program keluarga harapan memang tidak sepenuhnya membantu perekonomian tetapi mampu meringankan beban melalui bantuan yang berdasarkan komponen, program keluarga harapan sendiri sudah banyak mendukung masyarakat kelurahan Bulota dalam pemenuhan pendidikan dengan demikian masyarakat yang awalnya sulit untuk melanjutkan sekolah atau ekonomi yang menjadi masalah mereka dalam melanjutkan pendidikan sekarang sudah bisa sekolah melalui bantuan program yang diluncurkan Pemerintah yaitu bantuan program keluarga harapan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terkait dengan sub fokus penelitian maka dapat ditarik kesimpulan peneliti sebagai berikut.

1. Efektivitas merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengsucceskan PKH sudah berhasil sesuai dengan apa yang menjadi target atau tujuan dari program keluarga harapan PKH.
2. Efisiensi dalam PKH pelaksana kebijakan sudah menjalankan program sesuai dengan pedoman yang telah diberikan, akan tetapi masih ada hambatan yang ditemui oleh pendamping dalam proses pelaksanaan program.
3. Kecukupan besaran bantuan yang diterima oleh KPM diterima sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, KPM juga sudah merasakan perubahan dalam keluarga selama menjadi penerima bantuan.

4. Perataan dalam pelaksanaan PKH sudah disosialisasikan oleh pendamping ke masyarakat, dan pendamping kelurahan sering menginformasikan kepada KPM terkait dengan PKH, pendamping juga sudah menjalin komunikasi yang baik bersama KPM.
5. Responsivitas PKH yang berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah dari program dan masyarakat masih tetap mengikuti ketentuan yang diberikan seperti ikut serta dalam P2K2. KPM menganggap pendamping menunjukkan sikap yang baik.
6. Ketetapan KPM yang ditetapkan oleh pihak pelaksana sudah tepat sasaran dan KPM sudah merasakan manfaat dari PKH, program keluarga harapan juga sudah membantu ekonomi masyarakat penerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nazaruddin, P. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. In Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press.
- Isa, R. (2023). Manajemen Pelayanan Publik. pt. global eksekutif teknologi
- Jurnal
- Asnawai, I., Husain, M. N., & Sudirman, F. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Pendahuluan Masalah kemiskinan menjadi sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum.
- Asrizal, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
- Buang, R., & Purwanti, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Publik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 11(1), 1–13.
- Febriani, C., Rahmawati, J., & Silalahi, N. A. (2022). Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi kasus di Kampung Sidomulyo, Kecamatan
- Haji, A. (2021). Evaluasi program keluarga harapan (PKH) kelurahan senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga tahun 2020. 1090–1098.
- hidayat fahrul, D. (2023). No Impementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan talumolo `kecamatan dumbo raya kota kota gorontalo. 31–41.
- Naim, I., Isa, R., & Tohopi, R. (2022). Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Berkualitas Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. *Journal Administration and Public Service*
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*,
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada kecamatan long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Nanang, M. H. D. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Dalam Menertibkan Usaha Billiard DI Kota pekanbaru.
- Pratama, P. D. W., & Mudarya, I. N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- Rosdiana, Apriani, F., & Paselle, E. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Administrasi Publik*, 8(1), 9005–9017.